

Dimulai, Vaksinasi Tahap Kedua

TEMANGGUNG (KR) - Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Kabupaten Temanggung dimulai Selasa (23/2) dengan sasaran 5.000 orang pelayan publik, termasuk di dalamnya wartawan, serta tenaga medis yang belum divaksinasi pada tahap pertama. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Khabib Muallim mengatakan penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan di 26 Puskesmas, dua klinik Polri/TNI dan Graha Bhumi Phala serta Pendapa Pengayoman. "Kami melibatkan tenaga medis dari Puskesmas Temanggung dan Puskesmas Dharmo Rini, RSUD Temanggung, RSK Parakan, PKU Muhammadiyah dan RS Gunung Sawo," kata Khabib Muallim, Selasa (23/2).

Khatib mengatakan fokus vaksinasi tahap kedua gelombang pertama adalah kelompok yang jumlahnya sedikit seperti tokoh agama, ASN pelayan publik, relawan, tenaga kontrak, wartawan, TNI dan Polri serta tenaga medis yang belum divaksin pada tahap pertama. "Kelompok yang besar seperti guru, pedagang akan pada gelombang berikutnya, jika ada pengiriman vaksin kembali. Pada gelombang pertama ini hanya untuk 5000 orang," katanya. Dia mengatakan pada Senin (22/2) menerima 1000 dosis vaksin Covid-19 dari Dinkes Provinsi Jateng atau untuk sekitar 5000 orang, dengan dua kali dosis penyuntikkan. Ditarget penyuntikkan selesai sampai Jumat mendatang, untuk disusul gelombang berikutnya. (Osy)

Dua Pekan Jateng Bebas Zona Merah

SEMARANG (KR) - Penanganan Covid-19 di Jateng menunjukkan hasil positif. Selama dua pekan berturut-turut, tidak ada daerahpun dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang masuk kategori risiko tinggi (zona merah). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Selasa (23/2) menyampaikan dari lima daerah yang sebelumnya dikategorikan sebagai daerah zona merah, pada 25-31 Januari 2021 (Kendal, Karanganyar, Cilacap, Blora, dan Kebumen) pada dua 1-7 Februari dan 8-14 Februari, tidak ada daerah yang masuk zona merah. Angka kasus aktif juga terus mengalami penurunan. Dari 8.230 pada pekan sebelumnya, pekan ini kasus aktif hanya 7.300. Case Fatality Rate (CFR) juga menurun dan Recovery Rate (RR) juga mengalami peningkatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Jateng juga terus menurun, yakni untuk ICU hanya 38,08% dan tempat tidur isolasi hanya 33,01%. Bahkan sejumlah rumah sakit mengusulkan menutup layanan isolasi Covid-19 di tempatnya masing-masing dan menjadikan ruangan-ruangan itu untuk perawatan non Covid-19. "Sudah banyak yang mengajukan untuk menutup tempat isolasi Covid-19 dan memindahkan untuk perawatan non Covid-19, karena memang jumlah yang terpapar Covid-19 terus menurun," tutur Yulianto. (Bdi)

Boyolali Lakukan Vaksinasi Tahap Kedua

BOYOLALI (KR) - Setelah sukses melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap pertama, Kabupaten Boyolali bersiap vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali melakukan vaksinasi Covid-19 selama dua hari yakni Selasa-Rabu (23-24/2). Kepala Dinkes Kabupaten Boyolali Ratri S Survivalina, Senin (22/2) menjelaskan Kabupaten Boyolali mendapatkan 1.000 vial vaksin. Pada tahap kedua ini vaksin yang diberikan cukup berbeda dari segi dimensi yang lebih kecil volumenya.

"Karena untuk tahap kedua ini dalam satu vial itu bisa untuk 10 kali penyuntikan atau 10 dosis. Kalau yang pertama itu satu vial untuk satu kali dosis penyuntikan," terangnya. Vaksinasi yang diterima nantinya akan didistribusikan pada 5.000 sasaran. Tahap kedua ini menasar pada pelayan publik serta tenaga kesehatan (nakes) yang belum mendapatkan vaksin pada tahap pertama. Sebanyak 1.000 vaksin akan digunakan kalangan guru, TNI/Polri dialokasikan sebanyak 1.500 vaksin, anggota legislatif sebanyak 46 sasaran, dan 150 vaksin yang akan diberikan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian sebanyak kurang lebih 800 vaksin akan digunakan oleh pelayan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku bisnis, perbankan dan wartawan. (*-1)

Gizi dan Pangan Salah Sebabkan Anemia



KR-Sugeng Irianto

Prof Drh M Rizal Damanik

SEMARANG (KR) - Pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia/Persagi Pusat yang juga dosen UGM Dr Toto Sudargo SKM MKes menyampaikan persoalan remaja dengan anemia merupakan salah satu hal sangat serius yang harus diatasi atau ditekan serendah mungkin angkanya. Sejak 2012 pihaknya konsisten mengamati dan meneliti remaja putri di Yogya terkait anemia. Data dari sekolah-sekolah favorit Yogya, sedikitnya 37,9 persen siswa mengalami anemia gizi besi meski status gizi mereka cukup baik.

"Tahun 2020 kami melakukan pendataan serupa dan hasilnya 31 persen mengalami anemia, memang menurun dibanding 2012 tetapi masih tetap tinggi," ujar Dr Toto Sudargo saat menjadi pembicara Webinar Gizi dan Kesehatan 2021 yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Gizi (HIMAGI) Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (FIKKES) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) bekerjasama dengan Prodi Gizi Fikkes Unimus secara daring, Sabtu (20/2).

Tampil pula sebagai pembicara lainnya webinar yang dibuka WR III Unimus Dr Samsudi Raharjo MT MM dan Dekan Fikkes Dr Ali Rosidi MKes, Prof Drh M Rizal Damanik MRepSc PhD (guru Besar Gizi Masyarakat IPB), Dr Rita Ramayulis DSN MKes (Ketua Indonesia Sport Nutritionist Association/ISNA), dan Ir Purwanti Susanti MKes (dosen Unimus). Sementara itu Prof Drh M Rizal Damanik menyatakan banyak masyarakat Indonesia mengalami anemia. Sangat ironis karena Indonesia sangat subur dan melimpah bahan pangan apapun (flora fauna). Kalau misalnya terjadi di negara yang gersang dan tidak subur bisa dimaklumi. (Sgi)



CILACAP (KR) - Hasil inventarisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ditemukan tujuh permasalahan kawasan, tanah, dan lingkungan di Kabupaten Cilacap yang belum terselesaikan. Ketujuh masalah itu menjadi kendala dalam pengembangan pembangunan Cilacap, terutama terkait ditetapkannya Cilacap sebagai pusat kegiatan nasional (PKN). Permasalahan itu terdiri

rencana pengembangan kawasan industri Donan, pengembangan kawasan industri baru di Cilacap Timur, alih fungsi kawasan hutan menjadi permukiman di Desa Cimruto Kecamatan Patimuan, dan sengketa lahan antara Perhutani dengan masyarakat pada tanah yang diklaim sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kemudian konflik tanah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Kebun Kawung Blok Cikuya di Desa Bantar Kecamatan Wanareja, permohonan tanah sempadan Sungai Kalidonan oleh masyarakat RW 23 Kelurahan Donan, dan pengelolaan kawasan Nusakambangan dengan pembuatan rencana pemanfaatan dan pembagian zonasi. "Sejumlah persoalan tersebut hingga kini belum terselesaikan mengingat keterbatasan wewenang pemerintah daerah," ujar Bupati Cilacap Tatto

Suwarto Pamuji dalam temuannya dengan Deputy PLK Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendriati, awal pekan lalu.

Untuk itu, pihaknya berharap Deputy PLK Menko Marves dapat memfasilitasi hal tersebut, dan penyelesaian masalah tersebut menjadi prioritas, mengingat peneptasan status Kabupaten Cilacap sebagai PKN membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. "Kami berharap, ada solusi dari pemerintah pusat. Proyek RD-MP atau Refinery Development Master Plant statusnya tidak diubah, atau tetap seperti itu. Kemudian Desa Cimruto Kecamatan Patimuan sekarang ini sudah jadi definitif, mau diapakan lagi. Ini harus diselesaikan," Tatto Suwarto.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap berkomitmen terus mengembangkan sektor industri

baru, untuk mempermudah investasi dalam skala yang lebih besar. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Cilacap didasari Peraturan pemerintah (PP) Nomor 13/2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26/2008 tentang RTRW yang menetapkan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Rencana pengembangan kawasan industri baru meliputi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bengawan Donan di Kutawaru sekitar 4.000 ha, KPI Bulupayung seluas 1.625 hektar yang masuk Kawasan Strategis Provinsi, dan KPI Cilacap Timur 1.810 ha yang sebagian besar untuk industri perikanan terpadu. (Mak)



KR-Istimewa

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji saat mengadakan rapat secara virtual dengan Deputy PLK Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendriati.

Polda Jateng Segera Terapkan Tilang Elektronik

SEMARANG (KR) - Direktorat Lantas (Ditlantas) Polda Jateng, mulai 17 Maret 2021 akan menerapkan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penindakan bukti pelanggaran (tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas secara elektronik.

Terkait hal itu, akan dipasang 27 kamera yang terdiri dari 21 titik Closed Circuit Television (CCTV) dan 6 speedcam di beberapa wilayah di Jateng. "Speedcam kita gunakan untuk masyarakat yang ugal-ugalan," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Senin (22/2) di Regional Traffic Management Center (RTMC) Gedung Ditlantas Polda Jateng.

Ahmad Lutfi menjelaskan sistem penegakan lalu lintas yang dinamai ETLE bakal diluncurkan pada 17 Maret 2021. Kemudian,

tahap kedua dijadwalkan akan di launching pada bulan April 2021. "Nanti akan kita tingkatkan menjadi 52 titik, dengan harapan masyarakat akan tahu adanya ETLE Polda Jateng mendukung program Kapolri," tutur Ahmad Lutfi.

Pemberlakuan ETLE bertujuan mengurangi risiko anggota kepolisian 'bersentuhan' dengan masyarakat, dan menyadarkan masyarakat untuk patuh berlalu lintas. Pelanggaran yang terkait pemakaian helm, tidak pakai safety belt, pakai handphone dan melau-

wan arus akan ditindak.

Kapolda Jateng bersama Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Syarifudin, saat jumpa pers menunjukkan contoh pelanggaran yang terekam CCTV.

Hasil capture kamera ETLE tampak jelas dan detail termasuk plat nomor kendaraan. "Ini kelihatan semua, datanya juga ada. Motor bodong juga kelihatan di sini," ucapnya.

Rudy Syarifudin menambahkan sebetulnya ETLE bertujuan mencederaskan masyarakat telah terpasang sejak 3 tahun, namun karena regulasinya kala itu belum ada masih terdapat hambatan dalam penerapannya.

"Sekarang kita lakukan seluruhnya bekerja sama dengan Dispenda dan Dishub dimana di ETLE ini

akan melihat orang yang belum bayar pajak. Pelanggaran ada berapa ? salah satunya di traffic light pengendara menerobos lampu merah," terang Rudy Syarifudin.

Dijelaskan, jika dalam tiga kali surat tilang elektronik yang dikirim ke alamat pemilik kendaraan tidak diindahkan maka secara otomatis akan terblokir. Kemudian pelanggaran yang membayar denda harus menyertakan keseluruhannya, KTP asli, STNK dan sebagainya. Untuk disamakan jenis kendaraan dan pemiliknya.

Selain itu, ETLE juga telah terkoneksi dengan daerah lain sehingga pelanggaran berplat luar kota dapat dikenai sanksi. "Kita servernya terkoneksi langsung, jadi tilangnya di kita tapi datanya dari Jakarta," tuturnya. (Cry)

Sub Kontraktor 'Ngingu Bareng' Mengadu

PURWOREJO (KR) - Belasan sub kontraktor pembangunan kandang dan mitra calon peternak domba program 'Ngingu Bareng' yang digagas Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) Kabupaten Purworejo, mendatangi Mapolres Purworejo, Senin (22/2). Mereka melakukan konsultasi hukum atas polemik seputar pelaksanaan pembangunan kandang dan rencana kelanjutan program budi daya kambing itu.

Delapan sub kontraktor dan delapan mitra peternak diterima KBO Satreskrim Polres Purworejo secara bergantian. "Mereka ingin persoalan yang dihadapi dapat diketahui semua pihak, termasuk kepolisian. Ini istilahnya genduk-genduk roso dulu," kata pendamping dari LSM Tamperak, Sumakmun. Mitra dan sub kontrak-

tor masih akan menunggu serta belum akan mengambil langkah lebih lanjut, seperti gugatan pidana atau perdata.

Menurutnya, mereka hanya ingin persoalan yang dihadapi cepat selesai. Hak-hak sub kontraktor dan mitra KOIN, segera diselesaikan oleh pihak PT MGJ atau KOIN. Dikatakan, sub kontraktor dan mitra kerap mengeluhkan kesepakatan yang dinilai tidak dilaksanakan pihak perusahaan dan koperasi. "Misalnya, ada ucapan kata janji untuk diselesaikan, tapi tidak terealisasi. Itu kerap terjadi," tuturnya.

Program yang ditawarkan KOIN Kabupaten Purworejo, bagus dan tidak bermasalah. Bahkan, program 'Ngingu Bareng' dapat mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Purworejo

apabila dijalankan dengan mekanisme yang baik.

Sub kontraktor asal Cilacap, Suteng Priyambudi mengatakan, kedatangannya ke Mapolres Purworejo bukan dalam rangka pelaporan atau aduan hukum. Mereka menyampaikan aspirasi terkait keresahan karena sudah lama tidak menerima pembayaran atas proyek pembangunan kandang domba yang sudah dikerjakan sesuai perjanjian. Suteng dan belasan sub kontraktor lainnya berada di bawah bendera kontraktor utama Koperasi Serba Guna Rembang (KSGR).

"Kami total ada 14 sub kontraktor, tapi datang delapan, sisanya mengatakan untuk diwakilkan," tuturnya.

Menurutnya, jumlah dana yang belum dibayarkan kepada 14 sub

kontraktor itu mencapai kurang lebih Rp 11 miliar. "Sudah terwujud kandangnya, silakan cek lokasi, semua sudah sesuai dengan gambar.

Kalau kami menuntutnya kepada KSGR, tapi koperasi baru bayar kami jika sudah dibayar oleh pemberi tugas," terangnya. Suteng berharap pihak kepolisian memanggil dan mengklarifikasi para pihak terkait, sehingga dapat memberikan jawaban serta kepastian kapan sub kontraktor akan dibayar.

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Agus Budi Yuwono mewakili Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito mengemukakan, pihak kepolisian akan menampung serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sub kontraktor dan mitra. (Jas)

Mimbar Legislatif

Wartawan Harus Masuk Prioritas Vaksinasi Covid-19

ANGGOTA Komisi A DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie mengatakan, wartawan memang harus masuk dalam daftar prioritas untuk dilakukan vaksinasi Covid-19. Tugas wartawan dalam keseharian untuk mendapatkan berita mengharuskan bertemu dengan banyak kalangan, dianggap cukup rentan terpapar virus korona.

Untuk itu, langkah pemerintah pusat yang memasukkan kalangan wartawan dalam program vaksinasi tahap kedua sudah tepat. Langkah tersebut akan memberikan kenyamanan bagi wartawan untuk melaksanakan tugas kesehariannya tanpa rasa khawatir akan terpapar virus korona. Ini sebagai langkah antisipasi, agar wartawan tidak menjadi korban keganasan virus korona.

Sudah banyak wartawan yang terpapar Covid 19 dan harus menjalani karantina mandiri atau di tempat khusus. Ini menunjukkan kalau kalangan pers memang cukup rentan dan membutuhkan kehati-hatian dalam menjalankan tugas kesehariannya. Fakta yang terjadi di lapangan,



KR-Budiono

Masruhan Samsurie

meski sudah menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketika menjalankan kewajiban profesinya, masih juga ada yang terpapar.

Untuk itu Masruhan Samsurie yang juga selaku Ketua FPPPP DPRD Jawa Tengah minta kepada para insan pers agar tidak ragu-ragu mengikuti program vaksinasi Covid-19. Wartawan harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi.

Vaksin Covid-19 yang digunakan juga dijamin keamanannya dan kehalalannya. Apalagi para tokoh, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta tokoh masyarakat lainnya sudah memberikan contoh untuk divaksin terlebih dulu. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat, termasuk kalangan insan pers untuk menolak vaksinasi Covid-19. (*)

(Disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)



KR-Sri Warsiti

Pelayanan 'Titip Bandaku' di kawasan rawan bencana.